

TAJUK RENCANA

Aborsi dalam RUU Kesehatan

REVISI UU Kesehatan ditarget bulan Juli akan disahkan menjadi UU Kesehatan. Namun demikian, revisi ini masih menimbulkan masalah. Para aktivis perempuan menganggap, salah satu yang masih dianggap belum menyelesaikan masalah adalah aborsi. Sebelumnya sudah ada revisi untuk masalah memperpanjang masa maksimal masa kehamilan, bagi pelaku aborsi akibat kekerasan seksual dan kedaruratan, dari enam minggu menjadi 14 minggu. Namun bukan itu subsatansi masalahnya.

Seperti diketahui, hukum positif kita dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara eksplisit pada pasal 346 sampai 348, bahwa tindakan menggugurkan kandungan adalah tindak kejahatan. Padahal dalam perkara aborsi, seorang perempuan tentu bukan sekadar menggugurkan kandungan. Namun mengalami masalah dengan kesehatan, kemudian psikis dan masalah sosial lainnya mengingat kehamilan yang tidak diinginkan.

Beberapa alasan mengapa RUU kesehatan belum seluruhnya memuaskan perempuan karena masih ada dianggap ketidaksetaraan gender. RUU kesehatan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan atau tidak memperhatikan isu-isu yang relevan dengan kesehatan perempuan dapat memunculkan ketidakpuasan. Selanjutnya adanya akses terbatas. Sebab RUU kesehatan yang tidak mencakup layanan kesehatan yang mudah diakses oleh perempuan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Dapat menjadi masalah.

Sedangkan isu reproduksi dan kesehatan seksual, juga masih menjadi masalah. Dalam RUU kesehatan yang tidak memperhatikan isu-isu seperti, aborsi, kontrasepsi, atau penanganan kasus kekerasan seksual secara memadai juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan perempuan. Apalagi maraknya perdagangan seks anak,

menambah persoalan.

Data di Kementerian Sosial hingga Januari 2022, jumlah kasus anak perempuan hamil yang ditangani akibat kekerasan seksual berjumlah 780 orang - 568 melahirkan dan 212 belum melahirkan. Sementara hingga 31 Januari 2022, total kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.253 kasus, banyak para pelaku berasal dari lingkungan terdekat.

Mungkin masih ingat, salah satu kasus pemerkosaan yang membuat kita miris terjadi pada tahun 2018 . Yakni ketika seorang anak perempuan divonis enam bulan penjara karena mengaborsi bayi di kandungannya. Ada lagi kasus gadis berusia 15 tahun itu diperkosa berulang kali oleh kakak kandungnya. Namun, penderitannya belum cukup karena gadis itu malah dipenjarakan lantaran melakukan aborsi, walaupun kemudian di tingkat banding diputus bebas. Ia divonis bersalah karena melanggar UU Kesehatan yang mengatur bahwa aborsi legal jika usia kandungan kurang dari 40 hari. Nasib bocah yang sudah diperkosa, ketika hamil dipaksa aborsi, namun kemudian dihukum. Atau ada lagi kasus anak perempuan berusia 10 tahun dan disabilitas intelektual diperkosa tetangga dan hamil. Anak itu harus melahirkan bayinya. Alasannya, karena tidak ada layanan aborsi aman dan tidak ada tenaga kesehatan yang mau menjalankan karena ancaman penjara.

Sebenarnya masalah tersebut, tidak harus ditangani setelah kejadian. Namun pihak yang lain, harus juga ikut membantu. Usaha-usaha preventif pencegahan misalnya dengan literasi media. Literasi bagi perempuan dan anak saat ini sangat diperlukan. Dari sejumlah data menunjukkan bahwa anak perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Data catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kasus KBGO tahun 2021 meningkat 335%, yani 942 aduan dari 281 kasus aduan tahun sebelumnya. (***)

KUNJUNGAN Kaisar Naruhito ke Yogyakarta seakan melanjutkan lawatan serupa yang dilakukan pendahulunya, Kaisar Akihito, pada tahun 1991. Lawatan Kaisar Akihito pada 1991 dan Kaisar Naruhito pada Rabu (21/6) ini menjadi simbol kedekatan hubungan Jepang dengan DIY. Apalagi, DIY telah menjalin kerja sama *sister province* dengan Prefektur Kyoto sejak 1985. Kerja sama itu antara lain berbentuk pertukaran budaya dan penguatan sumber daya manusia.

Relasi yang dekat itu makin terasa dengan pemberian penghargaan Bintang Tanda Jasa *iThe Order of Rising Sun, Gold and Silver Star* dari Kaisar Jepang Naruhito kepada Sultan HB X pada 2022. Sultan HB X dinilai berperan besar dalam hubungan persahabatan kedua negara dan penguatan kerja sama *sister province* DIY-Kyoto (KR, 29/6). Peristiwa tersebut juga menjadi bagian penanda 37 tahun kerja sama DIY-Kyoto. Kerja sama *sister province* paling tua di Indonesia, paling produktif dan masih sangat aktif sampai hari ini.

Historis-Kultural

Kesamaan historis-kultural sebagian provinsi yang pernah menjadi ibukota negara yang kaya akan nilai perjuangan turut berperan sebagai pemungkin kerja sama DIY dan Kyoto. Keduanya juga menjadi kota pusat budaya dan pendidikan di masing-masing negara. DIY dan Kyoto merupakan daerah pusat budaya dan tujuan wisata baik nasional maupun internasional.

Dalam bidang kebudayaan beberapa aktivitas sudah dilakukan, di antaranya pengiriman perwakilan DIY ke Jepang dalam misi pertukaran budaya dengan mengadakan pameran batik. Pengiriman petugas untuk belajar teknis konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya. Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping, dan Candi Boko

M Taufiq AR dan Rufariza

Dalam bidang pendidikan, setiap tahun dilakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa, staff dan juga tenaga dosen guna meningkatkan kompetensi serta pemahaman masing-masing pihak terhadap



GRAFIS JOS

bidang keilmuannya dan dapat menjadi wadah pertukaran teknologi. Bidang pertanian juga menjadi salah satu bidang yang diuntungkan dalam kerja sama tersebut. Pihak DIY mengirim beberapa petugas untuk mempelajari budaya hortikultura di lahan kering dan kultur jaringan ke Kyoto.

Kewajiban Simbolik

Di samping banyaknya keuntungan dan benefit dari kerja sama *sister province* ini, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depannya. *Pertama*, kerja sama yang terjalin seyogianya tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban simbolis, namun juga bagaimana kedua belah pihak perlu berangkat dari analisis kepentingan bersama yang berorientasi ke masa depan. Dengan semangat persahabatan

yang saling menguntungkan.

Kedua, kerja sama ke depan perlu ditingkatkan pada sektor-sektor lain, seperti sektor kesehatan serta sektor teknologi dan informasi dalam rangka mendukung identitas sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata terkemuka di dunia. Perlu skema yang terprogram untuk pertukaran pelajar dan mahasiswa, pegawai, dan juga pendidik antardua provinsi. Guna mengokohkan identitas kedua daerah sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Kawasan Asia.

Ketiga, kerja sama ke depan seyoginya bukan hanya dalam format *government to government*, namun juga dapat diperluas pada kerja sama *business to business*. Kadin, Hipmi dan lainnya perlu diajak serta untuk menjajagi potensi kerja sama dengan asosiasi pengusaha di Kyoto. Harapannya, akan terbangun kemitraan strategis dan berkelanjutan yang produktif dan berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan kerja sama yang baik, *sister province* DIY dan Kyoto harus egaliter dan saling menguntungkan. □ - d

*) **M. Taufiq AR SIP MPA**, *perencana di Pemda DIY.*

Rufariza ST MA MURP, *alumni pendidikan di Jepang.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Mewujudkan PPDB Berkeadilan

Rudy Prakanto

sisanya dialihkan ke zonasi reguler.

Di pasal 1, Pergub 15/2023 menyebutkan, zonasi reguler adalah zona yang diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan/Desa ke SMA Negeri atau SMK Negeri. Sedangkan untuk zonasi radius adalah wilayah dengan jarak tertentu yang mengelilingi titik koordinat SMA/SMK Negeri, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk. Melalui zonasi radius, yang pendaftarannya lebih awal, memberi kesempatan casis bersekolah dekat tempat tinggalnya.

Jalur afirmasi diperuntukkan casis dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Casis dapat memilih jalur afirmasi di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerima casis penyandang disabilitas sebanyak 2 siswa per-rombongan belajar. Menyertakan rekomendasi hasil asesmen psikolog yang menyatakan anak tersebut mampu belajar di kelas reguler .

Jalur berpindah tugas orang tua/wali, mengakomodasi peserta didik berpindah tempat karena mengikuti berpindahnya tugas orangtua/walinya. Sedangkan jalur prestasi untuk casis yang memiliki nilai gabungan lebih dari 330. Diperuntukkan bagi casis yang berdomisili di luar Zona 1. Untuk mengapresiasi prestasi non akademik casis mendapat tambahan nilai pada nilai gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia PPDB

DIY. Diperuntukkan seluruh jalur pendaftaran.

Rentan Polemik

Pelaksanaan PPDB online, sangat rentan polemik sehingga perlu diantisipasi segala hal yang dapat menimbulkan kendala teknis maupun non teknis. Kondisi ini kadang dapat memicu kecurigaan orangtua casis ketika mereka tidak diberi pemahaman/aturan main PPDB secara utuh. Karenanya, sosialisasi masif ke masyarakat perlu dilakukan.

Diperlukan ruang evaluasi dan klarifikasi di sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk masyarakat secara transparan, melalui *help desk*, ataupun layanan aduan lainnya. Karena ada orang tua casis kurang memahami aturan PPDB secara menyeluruh. Walaupun kadang ada masalah, PPDB online diakui paling mampu melayani masyarakat lebih cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. □ - d

*)**Rudy Prakanto SPd Meng**, *Kepala Balai Tekkomdik Dikpora DIY.*

Pojok KR

Dibongkar di Yogya, praktik TPPO pekerjaan seks anak.

- **Orangtua dan lingkungan harus makin waspada.**

Tinggi, Kasus pernikahan dini di DIY.
- **Literasi digital dan perilaku untuk remaja harus makin ditingkatkan.**

Temuan pungli di Rutan sampai Rp 4 M.
- **Nah, ini namanya korupsi dari hulu sampai hilir.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Wisuda yang Memberatkan

MEMANG mengerankan saat ini, trend wisuda ada dimanamana. Bahkan dari TK sampai SMA. Zamansaya dahulu, wisuda hanya untuk kalangan mahasiswa. Rasanya bangga diwisuda, meski bukan akhir perjuangan. Namun saat ini, wisuda menjadi gaya hidup tentu memberatkan orangtua.

Bagi orang kaya tidak masalah, dengan enak menmgeluarkan duit karena bangga anaknya lu-

lus. Tetapi tidak semua begitu. Saya punya teman yang menyatakan repot harus membayar yang wisuda karena anaknya 3 kebetulan bareng lulus di TK, SD dan SMP. Sebab untuk daftar tentu masih butuh duit lagi dan tidak sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian para pengelola sekolah, karena sulit cari uang saat ini.

Ny Ernie Suseto, Jl Kaliurang Km 17, Sleman.

Bendera Partai Berubah Warna dan 'Pating Slawir'

PADA zaman orde baru, tatanan dan aturan ditegakkan. Pemasangan atribut partai hanya dilakukan saat ulangthuan dan menjelang pemilu. Dan itu ditegakkkan aturannya. Sehingga wajah jalanan kota bersih dari pemandangan pelbagai atribut partai.

Namun tidak sekarang. Sepanjang tahun yang namanya bendera partai terpasang di jalanan. Tidak perlu menunggu

pemilu atau ulang tahun. Bahkan saking lamanya berada di luar ruang sampai 'kehilangan warna' dan bentuknya 'pating slawir' karena koyak dimana-mana.

Mungkin pengurus partai pemilik bendera berbesar jiwa agar mau mengambil bendera partai yang sudah tidak karuan tersebut. Jangan sampai warna dasar semua partai menjadi keabu-abuan saking kotornya.

Muryani, Pleret Bantul